



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI WIDIHARTANTO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **426157**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.873.088.000**

1. Bangunan Seluas 3.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Bangunan Seluas 4.64 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/160 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/282 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah Seluas 846 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 108.288.000
6. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 204.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.815.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV CRV SUV 2500 CC AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, BMW X1 SDRIVE 181 F48 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 485.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ GLB 200 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **38.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	371.107.896
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.097.195.896
III. HUTANG	Rp.	373.268.883
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.723.927.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.